



SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN KE 5 TAHUN 2019



Tema:

"Sumbangsih Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Indonesia Lebih Baik"

Penyelenggara:



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Ida Susilowati

Atas partisipasinya sebagai:

Pemakalah

Judul makalah:

SISTER CITY JAKARTA-YERUSALEM SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT HUBUNGAN
BILATERAL INDONESIA-PALESTINA (STUDI KASUS PARADIPLOMACY PEMPROV DKI
JAKARTA – YERUSALEM TAHUN 2019)

Jakarta, 31 Agustus 2019

Koordinator Kerjasama

Ketua Panitia



Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, M.Sc, Ph.D

Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng

SISTER CITY JAKARTA-YERUSALEM SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PALESTINA (STUDI KASUS PARADIPLOMACY PEMPROV DKI JAKARTA – YERUSALEM TAHUN 2019)

Ida Susilowati¹, Nur Rohim Yunus²

¹Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor

²Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
idasusilowati@unida.gontor.ac.id, nurrohimyunus@uinjkt.ac.id

Abstrak

Palestina memiliki tempat tersendiri bagi rakyat Indonesia, baik berdasarkan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia maupun berdasarkan sosial keagamaan antara masyarakat kedua negara. Perkembangan dunia politik di era globalisasi turut mempengaruhi hubungan kerjasama kedua negara. Interdependensi dalam politik global menuntut adanya perubahan kebijakan setiap negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya, termasuk antara Indonesia dengan Palestina melalui paradiplomasi. *Paradiplomasi* terus ditingkatkan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, salah satunya melalui *sister city* untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang *paradiplomasi* melalui *sister city* kedua negara, khususnya antara pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan dengan pemerintah Palestina sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menerapkan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan metode penelitian kualitatif, maka penelitian melakukan analisis data data melalui tehnik deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka dalam mengumpulkan sumber dan bahan kajian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan bilateral melalui *sister city* antara kedua pemerintah daerah dari kedua negara, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi di masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan.

Kata kunci: *sister city, paradiplomasi, hubungan bilateral, globalisasi*

1. Pendahuluan

Globalisasi membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia. Globalisasi dipandang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di bidang sosial kebudayaan, globalisasi dinilai cukup berpengaruh terhadap degradasi pola hidup masyarakat menjadi konsumtif, individualis, dan semakin mempertajam kesenjangan sosial masyarakat (Nurhaidah, 2015). Globalisasi membawa tuntutan dan tantangan bagi negara-negara dunia di berbagai bidang. Interdependensi di bidang ekonomi politik antar negara semakin meningkat. Eko Digdoyo mengartikan globalisasi sebagai kemajuan yang dipenuhi persaingan di berbagai aspek kehidupan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berdampak pada perubahan sosial budaya secara bertahap (Eko Digdoyo, 2015). Eko Digdoyo lebih menekankan perubahan sosial budaya akibat perkembangan iptek dalam globalisasi, sementara Andreas Wenger dan Doron Zimmermann lebih menekankan pada perubahan bidang politik dan keamanan dunia yang ditandai dengan peristiwa 11 September 2001 silam. Andreas dan Doron berpendapat bahwa keamanan dunia menjadi terancam akibat aksi terorisme yang memunculkan keresahan dan sensitifitas masyarakat dunia akibat pemberitaan di media massa (Andreas & Doron, 2004). Keadaan ini berimbas pada perubahan pola politik dunia

kepada interdependensi negara dalam politik internasional, termasuk institusi internasional dalam memformulasikan kebijakan politik global.

Peta politik global menuntut setiap negara mampu berinteraksi dalam pola interdependensi global yang lebih kompetitif. Co-existence antar negara semakin meningkat dalam hubungan internasional termasuk Indonesia. Subyek hukum internasional turut mengalami perubahan, tidak lagi negara sebagai subyek primer yang bersifat statis namun menjadi lebih dinamis. *Sub-state actor* turut berperan serta dalam meningkatkan kerjasama antar negara melalui paradiplomasi, salah satunya dengan mengembangkan sister city antara dua wilayah lokal dari dua negara. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam politik global, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama.

Sebagai salah satu negara besar dengan penduduk mayoritas muslim, kerjasama bilateral dengan negara-negara muslim lainnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi Indonesia terutama dengan Palestina. Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina memiliki urgensi tersendiri dalam paradiplomasi, mengingat Palestina memiliki tempat tersendiri di hati mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Kerjasama bilateral Indonesia – Palestina sudah terjalin sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan politik global, menuntut kedua negara untuk mampu menyesuaikan perkembangan yang ada untuk mengintensifkan hubungan bilateral antara keduanya, salah satunya melalui konsep paradiplomasi sister city. Untuk membatasi penelitian, maka penulis memilih Pemprov DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus ibukota sebagai subyek dalam peningkatan kerjasama sister city Indonesia-Palestina masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan (2019).

2. Studi Pustaka

Hendra Maujana Saragih dalam jurnal FOKUS (jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan) yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa pemerintahan Joko Widodo" menjelaskan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Palestina di masa pemerintahan Joko Widodo. Kajian tersebut fokus dalam menganalisis hubungan bilateral kedua negara terutama dalam konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel, yaitu atas kasus pendudukan Yerusalem atas Al-Quds yang ditolak dengan tegas oleh presiden Joko Widodo (Hendra, 2018). Sementara dalam kajian ini difokuskan dalam pembahasan bilateral kedua negara yang lebih spesifik, yakni paradiplomasi antara kedua kota besar melalui sister city. Kajian Hendra menitik beratkan pada upaya pemerintah pusat dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka, sementara kajian kali ini lebih menitik beratkan pada upaya pemprov daerah khusus ibukota Jakarta dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan pemerintah Yerusalem melalui sister city sebagai salah satu indikator penilai adanya upaya pemerintah daerah dalam mempererat hubungan antara kedua kota besar.

Atika Dian Anggraini dalam tulisannya berjudul "Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama Sister City Dengan Seoul di Bidang Perdagangan" yang diterbitkan dalam Jurnal INSIGNIA (2017) membahas tentang kerjasama sister city antara pemda DKI Jakarta dengan Seoul di bidang perdagangan (Atika, 2017). Senada dengan penelitian kali ini, keduanya sama-sama membahas tentang hubungan bilateral melalui paradiplomasi sister city, namun dibedakan oleh obyek wilayah penelitian. Obyek wilayah kajian Atika antara pemda DKI Jakarta dengan Seoul, sementara penelitian kali ini dengan Palestina. Selain itu, Atika menerapkan studi kritis dalam penelitiannya, sementara dalam penelitian ini menerapkan studi kasus dalam menganalisa suatu permasalahan atau kejadian.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berdasar studi kasus pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menguatkan hubungan bilateral dengan pemerintah Palestina melalui peningkatan paradiplomacy Sister City khususnya di bidang peningkatan ekonomi kedua pihak. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dimana tehnik pengumpulan data melalui studi pustaka berdasarkan data-data yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen pemerintah setempat, dan website-website penunjang yang relevan. Paradiplomasi melalui sister city antara pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anis Baswedan dengan pemerintah Palestina melalui Duta Besarnya untuk Indonesia, mampu mempererat Hubungan Bilateral antara kedua negara menjadi hypotesa awal dari penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Paradiplomasi Sebagai Konsep Dasar Sister City Di Era Globalisasi

Paradiplomasi merupakan pelibatan pemerintah daerah sebagai sub-aktor dalam hubungan internasional karena dianggap memiliki peran penting dalam multi-track diplomacy sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional negara Indonesia. Paradiplomasi dipandang perlu bagi setiap negara-negara di era globalisasi. Paradiplomasi berdasarkan ruang lingkup wilayah diplomasi dapat dikategorikan menjadin 3 tipe, yaitu (1) *Transholder Paradiplomacy*, yaitu hubungan institusional antara dua pemerintah daerah dari dua negara yang berbatasan langsung secara geografis, (2) *Transregional Paradiplomacy*, yang merujuk pada paradiplomasi antara pemerintah daerah dari negara yang tidak berbatasan secara geografis namun masih dalam satu kawasan regional, dan (3) *Global Paradiplomacy*, dimana lingkup pemerintah daerah antar negara yang sifatnya lebih global diluar kawasan regional (Adirini, 2016). Sister city merupakan program pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah pemerintahan di daerahnya berlandaskan pada konsep paradiplomasi.

Di era globalisasi, interdependensi antar wilayah dan negara tidak dapat dipandang sebelah mata. Perkembangan peta politik di era globalisasi menciptakan perkembangan pula terhadap subyek hubungan internasional dari antar negara menjadi antar daerah dan antar individu. Konsep paradiplomasi dalam sister city semakin didukung pemerintah nasional Indonesia dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 367. Kebijakan tersebut tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi setiap daerah yang masih berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia, salah satunya daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta.

Heni Nurul Nilawati mengutip dari Farazmand, menjelaskan bahwa sister city atau kota kembar merupakan hubungan jangka panjang antara dua kota (dua pemerintahan daerah) dari dua negara berbasis kemitraan berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua kota setelah melalui masing-masing pemerintah nasional. Sister city dapat berupa pertukaran budaya, pendidikan, atau lainnya yang dinilai mampu memecahkan persoalan umum di kedua daerah, seperti green city, pertukaran pelajar, expo antar kedua daerah dan lainnya (Heni, 2016) yang bertujuan untuk menerapkan hubungan simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Sementara Inggang mendeskripsikan sister city merupakan konsep kerjasama mikro melalui jalur diplomasi sebagai upaya meningkatkan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan kesamaan karakteristik sosial budaya, geografi, maupun permasalahan publik (Inggang, 2018).

Sebagai upaya mengoptimalkan kerjasama antar negara, pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan kebijakan mengenai hubungan luar negeri pemerintah Indonesia dalam UU No.37 Tahun 1999 dan kebijakan mengenai perjanjian internasional dalam UU No.24 Tahun 2000. Sementara kebijakan tentang Sister City di Indonesia diatur

dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal 28 Desember Tahun 2006, tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

4.2. Urgensi Hubungan Bilateral Indonesia – Palestina

Hubungan antara Indonesia dengan Palestina telah terkalin sejak awal kemerdekaan Indonesia, ketika Indonesia meminta dukungan Internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai timbal balik, Indonesia senantiasa mendukung Palestina melawan kolonialisme Israel atas Palestina hingga saat ini. Peran palestina dalam kemerdekaan Indonesia menjadi dasar utama kuatnya hubungan bilateral kedua negara. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi pertimbangan berikutnya yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kerjasama dengan Palestina. Palestina sebagai negara yang memiliki historis agama kuat bagi muslim dunia, tentunya menjadi keistimewaan sendiri atas kedudukan Palestina di hati umat muslim di Indonesia. Didukung dengan kepentingan nasional Indonesiadalam melawan penjajahan di dunia dan mendukung penuh terciptanya perdamaian dunia, semakin menguatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina senantiasa terjaga sejak masa Presiden RI pertama, Soekarno yang memiliki kesamaan prinsip utama yaitu melawan imperialisme penjajahan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sejak presiden Soekarno hingga presiden Jokowi, pemerintah Indonesia senantiasa meningkatkan kerjasama bilateral dengan Palestina. Tidak hanya dukungan moril namun juga dukungan materil terhadap Palestina. Tidak hanya antar pemerintah, organisasi non-pemerintah pun turut serta mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaan Palestina atas imperialisme Israel, seperti ACT, KNRP, dan organisasi-organisasi sosial lainnya.

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina sekaligus membuka kedutaan besar Indonesia di Palestina (1988). Indonesia melalui PBB, OKI, dan GNB secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kedaulatan Palestina sampai akhirnya Palestina menjadi anggota ke-195 UNESCO (31/10/2011) dan mendapatkan status sebagai negara dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB (29/11/2012). Di bidang ekonomi, kerjasama antara keduanya seringkali terkendala dengan kebijakan pemerintah Israel yang membatasi pergerakan barang dari dan ke wilayah Palestina. Di bidang sosial budaya, telah dibentuk Palestinian Indonesian Friendship Association (PIFA). Di bidang pendidikan, keduanya melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan hubungan diplomatik serta student exchange. Sementara di bidang pariwisata, adanya penyelenggaraan pameran, konferensi, lokakarya, dan seminar sebagai upaya mendorong kunjungan wisata di kedua negara. Meskipun kerjasama bilateral kedua negara belum dapat terwujud secara optimal karena keterbatasan Palestina atas konflik dengan Israel, namun kerjasama antara keduanya terus ditingkatkan salah satunya dengan diadakannya konsul kehormatan Indonesia di Ramallah (KBRI Amman, 13/3/2016).

4.3. Kebijakan Sister City Jakarta-Palestina

Era globalisasi telah menciptakan *global governance* dalam hubungan internasional, yang mana dinamika hubungan antar negara tidak lagi bersifat statis akan tetapi memiliki karakter dinamis. Muhadi Sugiono mengatakan, bahwa organisasi global governance kontemporer tidak lagi menyatakan dominasi negara sebagai aktor utama, namun telah berkembang di berbagai tingkat baik lokal, daerah, nasional, maupun internasional global (Muhadi, 2005). Perkembangan ini membuka peluang bagi pemerintah lokal maupun daerah dalam mengembangkan wilayahnya melalui sister city, antara lain Aceh, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Ambon, Medan, dan pastinya Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta turut serta aktif dalam mengotimalkan paradiplomasi melalui sister city untuk meningkatkan kerjasama dengan kota-kota di negara lain di berbagai bidang. Sejak tahun 1979 hingga februari 2019, tercatat 21 kota di dunia (Jeddah, Seoul,

Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kyiv, Moskow, Al-Quds, Pyongyang, dan Budapest) telah menjalin kerjasama sister city dengan Jakarta dan salah satunya adalah Al-Quds, Yerussalem. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Muhammad Mawardi, Ka Biro Kepala Daerah (KDH) dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) DKI Jakarta dalam Berita Jakarta (beritajakarta, 13/2/2019).

Seiring perkembangan era globalisasi dan politik global, kerjasama bilateral antara Indonesia Palestina tidak hanya dilakukan antara pemerintah pusat akan tetapi berkembang antara dua pemerintah daerah melalui kerjasama sister city antara Jakarta dengan Al-Quds, Yerussalem. Sebagaimana dikutip dalam website resmi kemenlu, bahwa MoU sister city antara Jakarta – Yerussalem mencakup bidang pengendalian bencana dan krisis, pendidikan dan pelatihan, serta sosial dan budaya yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2007 oleh kedua pemerintah daerah (KBRI Amman).

Diantara implementasi kerjasama sister city Jakarta dengan Yerussalem yaitu melalui pelaksanaan Festival Film Palestina (kompas, 16/12/2012) dalam rangka menunjukkan kesamaan dalam keragaman sosial budaya, kerukunan dalam pluralisme, dan prinsip mewujudkan perdamaian dunia serta melawan imperialisme. Di tahun 2015 kembali diadakan expo atau pameran, salah satunya di tahun 2015 yang bertema "Jerusalem: History and Civilization" (Republika, 2015) dalam rangka untuk mengenalkan sosial budaya kedua negara dan beberapa event lainnya.

4.4.Peningkatan Sister City Jakarta–Palestina 2019 Sebagai Upaya Mempererat Hubungan Bilateral Indonesia-Palestina

Sebagaimana upaya peningkatan sister city Jakarta dengan Seoul, Beijing, Paris, Istanbul, dan kota-kota besar lainnya, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan interaksi melalui sister city dengan kota Yerussalem. Jika sister city antara Jakarta-Seoul di bidang perdagangan dilaksanakan berdasarkan kesamaan kedudukan kedua kota sebagai ibukota negara yang mengakibatkan pesatnya perekonomian di kedua pemerintahan daerah dibanding kota-kota lainnya (Atika, 2017), sementara sister city antara Jakarta-Yerussalem di bidang perdagangan dilaksanakan berdasarkan kesamaan kedua kota sebagai negara

Terhitung sejak penandatanganan MoU sister city tahun 2007, paradiplomasi sister city Jakarta-Yerussalem telah berjalan selama 12 tahun. Selama 12 tahun, sejumlah program telah dilaksanakan kedua daerah baik melalui kunjungan antara kedua pejabat daerah, kunjungan pelajar, maupun pameran kebudayaan. Paradiplomasi tersebut kembali dikembangkan di tahun 2019 ini, khususnya di beberapa bidang diantaranya seni budaya, tehnik pemadam kebakaran, gerakan kemanusiaan, termasuk *search and rescue* kota. Posisi pemerintah Indonesia sendiri yang senantiasa tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina, memberi efek tersendiri bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

Pada tanggal 23 juli 2019 silam, Dubes Palestina untuk RI –Zuhair Al-Shun-kembali bertemu dengan Gubernur Jakarta aktif, Anis Baswedan. Kesempatan tersebut dioptimalkan oleh kedua belah pihak untuk meningkatkan kerjasama bilateral, khususnya di bidang perdagangan. Gubernur Jakarta, Anis Baswedan memilih untuk mengembangkan kerjasama *business to business* karena menurutnya hubungan *people to people* dan hubungan diplomatik pemerintahan sudah dilaksanakan, sehingga perlu dikembangkan ke ranah perdagangan (Republika, 23/7/2019). Anies juga mengundang para delegasi bisnis Palestina mempromosikan produk unggulan Palestina pada bulan September 2019 mendatang di Bazar rakyat, yang digelar dalam rangka memperingati bulan Muharram. Keputusan tersebut diambil Anis mengingat Palestina memiliki potensi dibidang ekonomi khususnya produk-produk seperti kurma, minyak zaitun, dan baklava (Alinea, 23/7/2019).

5. Kesimpulan

Dinamika politik internasional di era globalisasi memberikan warna dan pola tersendiri dalam hubungan internasional. Tuntutan atas kompleksitas permasalahan politik negara, menimbulkan perkembangan inter-konektifitas tidak lagi berpusat antar negara (*state actors*) namun berkembang menjadi inter-konektifitas antar pemerintah daerah (*sub-state actors*) melalui konsep paradiplomacy sister city. Jakarta sebagai kota besar di Indonesia sekaligus ibukota negara, mau tidak mau harus siap menghadapi tantangan global paradiplomacy sister city sebagaimana kota-kota besar lainnya di dunia. Sister city Jakarta-Yerusalem belum dapat dilaksanakan secara optimal, mengingat situasi dan kondisi politik di Palestina. Namun kendala tersebut tidak menyurutkan kedua belah pihak untuk senantiasa mengembangkan hubungan bilateral kedua kota sejak penandatanganan MoU sister city (2007) hingga saat ini. Upaya mengembangkan kerjasama di bidang pengendalian bencana dan krisis, pendidikan dan pelatihan, serta sosial dan budaya terus dilaksanakan melalui beberapa event seperti kunjungan pelajar, gerakan kemanusiaan, maupun pameran kebudayaan. Tahun 2019 ini, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali menghidupkan paradiplomacy dengan Palestina melalui Dubes Palestina untuk Indonesia (Zuhair Al-Shun). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berupaya meningkatkan kerjasama khususnya di bidang ekonomi perdagangan. Kebijakan tersebut berdasarkan pada kepentingan pengembangan hubungan bilateral kedua negara, yang dinilai bahwa hubungan *people to people*, sosial budaya dan sosial budaya telah terlaksana. Sehingga perlu dikembangkan ke bidang ekonomi perdagangan melalui bazar rakyat. Berdasarkan langkah diplomasi yang diterapkan Anies Baswedan, menunjukkan adanya peningkatan paradiplomacy antara Jakarta dengan Palestina menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Adirini Pujayanti, 2016, *Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi* dalam Jurnal *Politica*, Vol. 7 No. 1, 79

Adriana Megawati, 2019, *21 Kota di Dunia Jalin Kerjasama Sister City dengan Jakarta*, Beritajakarta: Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 31 Februari 2019, 20:01 WIB.

Andreas Wenger & Doron Zimmerman, 2004, *International Relations From The Cold War To The Globalized World*, Viva Books Private Limited: New Delhi, India, Edisi Pertama.

Atika Dian Anggraini, 2017, *Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama Sister City Dengan Seoul di Bidang Perdagangan*, dalam Jurnal *INSIGNIA*, Vol. 4, No. 1, 2.

Eka Setyaningsih, *Kunjungi Anies Baswedan, Dubes Palestina Bahas Ekonomi*, [alinea.id](https://www.alenia.id/nasional/kunjungi-anies-baswedan-dubes-palestina-bahas-ekonomi-b1Xj29IOA), Selasa 23 Juli 2019, diakses dari <https://www.alenia.id/nasional/kunjungi-anies-baswedan-dubes-palestina-bahas-ekonomi-b1Xj29IOA>

Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum, 2015, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Ghalia Indonesia: Bogor, Cetakan Pertama.

Hendra Maujana Saragih, 2018, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa pemerintahan Joko Widodo*, Jurnal *FOKUS: jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 02.

Heni Nurul Nilawati, 2016, *Pelaksanaan Program Sister City Dalam Perspektif Sound Governance: Studi Kasus Kota Surabaya*, Jurnal *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Volume 4 Nomor 2, 306

Inggang Perwangsa Nuralam, 2018, Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City, *Journal Of Applied Business Administration*, Vol 2, No 1, 149

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah Merangkap Negara Palestina, diakses dari <https://kemlu.go.id/amman/id/pages/indonesia-palestina/2415/etc-menu>

Kompas.com, 2012, *Dirintis Sister City Jakarta-Yerusalem*, Minggu 16 Desember 2012, diakses dari <https://olahraga.kompas.com/read/2012/12/16/19040261/dirintis.sister.city.jakarta-yerusalem>

Muhadi Sugiono, 2005, *Globalisasi, Global Governance, dan Prospek Governance di Dunia Ketiga* dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 3, 250.

Nurhaidah, M. Insyah Musa, 2015, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3 No. 3, April. 1

Republika.co.id, 2015, *Dubes Palestina: Yerusalem Sister City Jakarta*, Rabu, 16 Desember 2015, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nzgce9377>

Republika.co.id, 2019, *Anies Baswedan Jamu Dubes Palestina*, Selasa 23 Juli 2019, 09.46 WIB, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pv2q7g423>

Safitri Wulansari, 2017, *Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Sister City Jakarta-Beijing Di Bidang Pariwisata Tahun 2009-2015*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 4, 1275